

TOFEDU: The Future of Education Journal

Volume 4 Number 8 (2025) Page: 4347-4357

E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135

https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

Commissive Speech Acts in President Prabowo Subianto's Speech at the 80th UN General Assembly: A Pragmatic Analysis

Isnaeni

Faculty of Languages and Literature, Universitas Negeri Makassar, Indonesia Email: isnaeni@unm.ac.id

ABSTRACT

This study examines commissive speech acts in President Prabowo Subianto's first speech at the 80th United Nations General Assembly in 2025 using a pragmatic approach. Commissive speech acts were chosen because the speech contains many statements that demonstrate political commitments, diplomatic promises, and Indonesia's strategic plans on global issues. This study uses a qualitative descriptive method with data consisting of utterances containing commissive elements in the speech. The analysis results show that the commissives that appear include forms of promises, willingness, commitments, and long-term plan statements. These findings indicate that the speech functions not only as a means of conveying information but also as a tool to build a diplomatic image and demonstrate Indonesia's position at the international level. Overall, commissive speech acts play an important role in reinforcing the political message and policy direction that Indonesia aims to assert in the global forum.

Keywords: Commissive speech acts, pragmatics, political speech, Prabowo Subianto, UN General Assembly

PENDAHULUAN

Pidato politik adalah momen strategis di mana pemimpin negara menyampaikan pandangan, kebijakan, dan aspirasi kepada audiens domestik maupun internasional. Lebih dari sekadar berbagi informasi, pidato semacam itu berfungsi sebagai instrumen diplomasi, retorika politik, dan pembentukan citra negara. Dalam perspektif pragmatik, salah satu aspek penting yang dapat dianalisis dari pidato politik adalah tindak tutur komisif tuturan yang menunjukkan komitmen pembicara terhadap suatu tindakan di masa depan, seperti janji, kesanggupan, niat, atau sumpah.

Studi pragmatik terkait tindak tutur komisif dalam pidato politik telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, Yelmida & Wini Tarmini (2024) meneliti variasi komisif dalam pidato politisi partai melalui video YouTube, dan menemukan jenis-jenis komisif seperti niat, berjanji, bersumpah, dan menawarkan.

Penelitian lain oleh Fadillah Fitri & Asnawi (2024) menganalisis debat publik kandidat gubernur Riau, menunjukkan bahwa janji (promise) sangat dominan sebagai strategi membangun kredibilitas politik. Sementara itu, studi pragmatik terhadap pidato dari konteks konflik juga muncul, seperti analisis pidato Abu Ubaidah pasca-konflik Hamas-Israel yang mengidentifikasi peran komisif dalam menyampaikan sumpah dan janji sebagai bagian dari narasi moral dan politik. Selain itu, kajian terhadap pidato kampanye Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 juga menunjukkan kehadiran tindak tutur komisif bersama ilokusi lain seperti asertif, direktif, dan ekspresif.



Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji tindak tutur komisif dalam pidato kenegaraan Presiden Indonesia di forum global misalnya Sidang Umum PBB masih sangat terbatas. Padahal, forum PBB adalah panggung multilateral yang sangat strategis, di mana pernyataan komisif seperti komitmen pengiriman pasukan perdamaian, kontribusi finansial, dan dukungan terhadap solusi dua negara memiliki implikasi diplomatik dan kebijakan yang besar.

Hal itulah yang mendorong peneliti untuk menganalisis pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 dari segi tindak tutur komisif. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang strategi bahasa Presiden Prabowo dalam menyampaikan komitmen internasional, sekaligus berkontribusi pada kajian pragmatik politik di konteks diplomasi global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bentuk-bentuk tindak tutur komisif yang muncul dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB ke-80. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menafsirkan makna setiap tuturan berdasarkan konteks, tujuan komunikasi, dan fungsi ilokusi dalam pidato politik internasional. Sumber data penelitian ini adalah rekaman pidato yang diunggah melalui YouTube, di mana data dikumpulkan dalam bentuk tuturan atau kalimat yang memuat unsur tindak tutur komisif.

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode simak dan catat dengan beberapa tahap, yaitu menonton video berulang kali untuk memahami konteks pidato, mentranskripsi seluruh tuturan ke dalam bentuk teks, mengidentifikasi tuturan yang mengandung ilokusi komisif, dan memberi kode pada setiap tuturan yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori tindak tutur John Searle (1969), khususnya kategori komisif. Tuturan yang ditemukan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti janji, komitmen, kesediaan, dan pernyataan niat, kemudian dianalisis untuk menafsirkan fungsi komunikatifnya dalam konteks diplomasi dan kebijakan internasional. Penelitian ini juga memperkuat keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi teori, membandingkan hasil analisis dengan temuan penelitian sebelumnya.

Beberapa penelitian relevan yang dijadikan acuan antara lain Yelmida & Wini Tarmini (2024) yang meneliti komisif dalam pidato politisi melalui YouTube, Fadillah Fitri & Asnawi (2024) yang menganalisis janji kandidat dalam debat publik, serta penelitian mengenai pidato kampanye Prabowo Subianto (2019) yang menekankan strategi bahasa komisif dalam membangun kredibilitas politik.

Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti tidak hanya mengidentifikasi jenis-jenis komisif, tetapi juga memahami bagaimana strategi bahasa digunakan untuk memperkuat citra diplomatik Indonesia di forum internasional.

HASIL PENELITIAN

Hasil analisis tindak tutur komisif yang terdapat dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB ke-80 menunjukkan janji, komitmen, kesediaan, dan pernyataan niat Indonesia dalam menghadapi berbagai isu global, mulai dari dukungan terhadap PBB, kontribusi dalam misi perdamaian, pembangunan ketahanan pangan, hingga upaya mitigasi perubahan iklim. Data yang diperoleh melalui transkripsi video pidato dari YouTube diklasifikasikan berdasarkan jenis komisif Searle, J. R. (1976) dan dianalisis fungsinya dalam konteks diplomasi dan komunikasi politik internasional.

Pertama, tindak tutur komisif komitmen. Kelompok komisif ini menekankan konsistensi dan tanggung jawab Indonesia dalam berbagai isu global dan domestik. Tindak tutur seperti menegaskan dukungan terhadap multilateralisme, membangun ketahanan pangan,



serta transisi energi bersih menunjukkan bahwa Indonesia secara serius memposisikan diri sebagai aktor yang bertanggung jawab di panggung internasional.

Fungsi utamanya adalah menegaskan keseriusan negara dalam menjaga komitmen jangka panjang, baik dalam mendukung PBB, menyelesaikan masalah kemiskinan, maupun menghadapi perubahan iklim, sehingga citra diplomatik dan kredibilitas Indonesia diperkuat. Tindak tutur komisif komitmen dalam pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80 dapat dikelompokkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tindak tutur komisif komitmen

| No. | Kutipan Tindak Tutur | Konteks Ujaran | Fungsi Tuturan |
|-----|---|--|--|
| 1 | "Kami tetap berkomitmen pada internasionalisme, multilateralisme, dan pada setiap upaya yang memperkuat lembaga besar ini." | Menegaskan posisi Indonesia di panggung global | Menegaskan posisi Indonesia secara konsisten di forum internasional |
| 2 | "Kami akan memikul beban ini, tidak hanya dengan putra-putri kami." | Komitmen berbagi beban misi perdamaian | Menunjukkan tanggung jawab kolektif Indonesia dalam operasi perdamaian |
| 3 | "Kami sedang membangun rantai pasokan pangan yang tangguh" | Pembangunan ketahanan pangan | Menunjukkan kesungguhan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan global |
| 4 | "Kami berinvestasi dalam pertanian cerdas iklim untuk memastikan ketahanan pangan" | Upaya teknologi dalam pertanian | Menegaskan strategi dan langkah nyata menghadapi perubahan iklim |
| 5 | "Indonesia sedang beralih secara signifikan dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju energi terbarukan." | Energi nasional | Menunjukkan keseriusan Indonesia dalam transisi energi bersih |
| 6 | "Tujuan kami jelas: Mengentaskan seluruh warga negara kita dari kemiskinan." | Pembangunan nasional | Menekankan tanggung jawab pemerintah untuk kesejahteraan rakyat |
| 7 | "Kami berkomitmen untuk memenuhi kewajiban Perjanjian Paris 2015." | Perubahan iklim & perjanjian internasional | Menegaskan tanggung jawab global Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim |
| 8 | "Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini." | Visi perdamaian global dan kemanusiaan | Menunjukkan partisipasi aktif Indonesia dalam perdamaian global |

Kedua, tindak tutur komisif janji/kesediaan menyoroti kesiapan Indonesia untuk mengambil tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Contohnya adalah kesiapan mengerahkan pasukan perdamaian, mendukung PBB, dan menyuplai bantuan pangan.

Fungsi utamanya adalah menunjukkan bahwa janji yang diucapkan memiliki implikasi tindakan konkret, baik dalam kontribusi personel maupun finansial, sehingga pidato tersebut memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang aktif, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan di forum internasional. Berikut diuraikan dalam tabel wujud tindak tutur komisif janji/kesediaan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB ke-80.

Konteks Ujaran No. Kutipan Tindak Tutur **Fungsi Tuturan** "Kami akan terus melayani di mana Menunjukkan kesiapan perdamaian membutuhkan penjaga, Komitmen Indonesia Indonesia mengambil bukan hanya dengan kata-kata, 1 terhadap pasukan tindakan nyata dalam dengan pasukan perdamaian tetapi menjaga perdamaian lapangan.' Memperkuat kredibilitas jangka "Indonesia akan terus mendukung Dukungan dan konsistensi diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa." panjang terhadap PBB Indonesia "Indonesia siap mengerahkan Kesiapan Indonesia Menegaskan kesanggupan 20.000 atau bahkan lebih putra-3 mengirim konkret Indonesia dalam pasukan putri kami untuk mengamankan perdamaian misi perdamaian perdamaian..." Menekankan "Kami juga bersedia berkontribusi kesiapan Kontribusi finansial secara finansial untuk mendukung Indonesia mendukung misi Indonesia misi besar PBB..." PBB secara material Menyampaikan visi jangka "Kami yakin, dalam beberapa tahun Visi panjang dan keyakinan dan janji 5 ke depan, Indonesia akan menjadi kesungguhan Indonesia dalam pembangunan lumbung pangan dunia." pangan

Tabel 2. Tindak tutur komisif janji/kesediaan

Selanjutnya, tindak tutur komisif janji/rencana. Tuturan ini menekankan perencanaan dan target jangka menengah hingga panjang, misalnya dalam transisi energi terbarukan, nol emisi bersih, dan reboisasi lahan terdegradasi. Ujaran-ujarannya menunjukkan strategi dan keseriusan Indonesia dalam mengimplementasikan perubahan yang berkelanjutan.

Fungsi komisifnya adalah memperlihatkan langkah-langkah konkret yang direncanakan negara, sehingga pidato tidak hanya sekadar retorika tetapi juga mencerminkan arah kebijakan yang jelas dan realistis. Berikut diuraikan dalam tabel wujud tindak tutur komisif janji/rencana dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB ke-80 yang digelar 23 September 2025.

| No. | Kutipan Tindak Tutur | Konteks Ujaran | Fungsi Tuturan |
|-----|--|------------------|---|
| 1 | "Mulai tahun depan, sebagian besar kapasitas pembangkit listrik tambahan kami akan berasal dari energi terbarukan." | | Menegaskan rencana konkret menuju energi terbarukan |
| 2 | "Kami menargetkan mencapai nol emisi bersih pada tahun 2060 dan kami yakin dapat mencapainya lebih awal." | Target emisi | Menunjukkan rencana dan kesungguhan dalam mencapai target lingkungan |
| 3 | "Kami menargetkan reboisasi lebih dari 12 juta hektar lahan terdegradasi" | Lingkungan hidup | Mengomunikasikan langkah konkret untuk pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat |

Tabel 3. Tindak tutur komisif janji/rencana

Terdapat pula tindak tutur komisif komitmen moral, komisif jenis ini menekankan nilainilai moral dan solidaritas historis, seperti pernyataan bahwa Indonesia tidak akan melupakan bantuan PBB di masa lalu.

Fungsi utamanya adalah memperkuat legitimasi moral Indonesia di mata dunia dan menekankan rasa tanggung jawab yang lahir dari pengalaman sejarah, sehingga hubungan



diplomatik dan citra negara sebagai mitra yang beretika menjadi lebih kuat. Berikut diuraikan dalam tabel wujud tindak tutur komisif komitmen moral dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB ke-80.

Tabel 4. Tindak tutur komisif komitmen moral

| No. | Kutipan Tindak Tutur | Konteks Ujaran | Fungsi Tuturan |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | "Kami tidak akan pernah lupa." | Solidaritas historis dan moral | Menekankan penghargaan dan solidaritas terhadap bantuan internasional di masa lalu |

Tindak tutur komisif komitmen politik menyoroti posisi politik Indonesia terhadap isu internasional, misalnya dukungan terhadap Solusi Dua Negara di Palestina. Fungsi komisifnya adalah menegaskan sikap diplomatik dan moral Indonesia, sekaligus memperlihatkan kepemimpinan negara dalam isu politik global yang sensitif.

Hal ini menunjukkan bahwa pidato tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengomunikasikan nilai-nilai diplomasi dan perdamaian. Berikut diuraikan dalam tabel wujud tindak tutur komisif komitmen politik dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB ke-80 Tahun 2025.

Tabel 5. Tindak tutur komisif komitmen politik

| No. | Kutipan Tindak Tutur | Konteks Ujaran | Fungsi Tuturan |
|-----|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| | "Saya ingin menegaskan kembali | | Mempertegas posisi |
| 1 | dukungan penuh Indonesia | Konflik Israel- | diplomatik dan moral |
| 1 | terhadap Solusi Dua Negara di | Palestina | Indonesia terhadap isu |
| | Palestina." | | Palestina |

Terakhir, tindak tutur komisif komitmen kolektif. Komisif ini bersifat ajakan dan seruan untuk tindakan bersama, seperti penggunaan sains demi kemanusiaan dan seruan untuk bertindak segera menghadapi tantangan global.

Fungsi utamanya adalah membangun kesadaran kolektif di antara negara-negara peserta sidang PBB, menekankan bahwa isu global memerlukan kolaborasi, dan mendorong tanggung jawab bersama. Dengan demikian, pidato menekankan pentingnya kerja sama multilateral dalam menyelesaikan masalah dunia. Berikut diuraikan dalam tabel wujud tindak tutur komisif komitmen politik dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB ke-80:

Tabel 6. Tindak tutur komisif komitmen kolektif

| No | Kutipan Tindak Tutur | Konteks Ujaran | Fungsi Tuturan |
|----|--|--|---|
| | "Mari kita gunakan sains untuk mengangkat, bukan untuk menghancurkan." | Ajakan global untuk penggunaan sains | Mengajak negara-negara lain bertindak bijak dan kolaboratif demi kemanusiaan |
| , | "Kita harus bertindak sekarang." | Seruan tindakan bersama negara- negara dunia | Menekankan urgensi aksi bersama dalam menghadapi tantangan global |

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB ke-80 menunjukkan sejumlah bentuk tuturan komisif. Di



antaranya adalah komisif komitmen, komisif janji kesediaan, komisif janji/rencana, komisif komitmen moral, komisif komitmen politik, dan komisif komitmen kolektif.

Komisif komitmen

Dalam kelompok komitmen, tuturan seperti "kami tetap berkomitmen pada internasionalisme ... memperkuat PBB" dan "kami berkomitmen untuk memenuhi kewajiban Perjanjian Paris 2015" mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo tidak hanya menyatakan dukungan jangka pendek, tetapi menegaskan tanggung jawab strategis jangka panjang Indonesia.

Komitmen-komitmen ini diposisikan sebagai pondasi diplomasi moral dan politik, di mana Indonesia ingin dipandang sebagai aktor global yang stabil dan dapat diandalkan. Pola semacam ini sejalan dengan hasil penelitian Triana Lestari (2025), yang menganalisis pidato internasional Prabowo dan menemukan bahwa komisif digunakan secara strategis untuk menegaskan keseriusan negara dalam isu masa depan, terutama dalam konteks perdamaian dan kemanusiaan.

Pernyataan komitmen dalam pidato menunjukkan pendekatan diplomasi berbasis nilai yaitu negara membebankan pada dirinya peran aktif dalam pembangunan global, keadilan sosial, dan perdamaian. Tindakan komitmen ini mencerminkan strategi bahasa yang digunakan untuk memperkuat citra Indonesia sebagai pemimpin moral dunia, bukan hanya kekuatan negara biasa.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Putra dan Teguh (2025) yang meneliti strategi citra politik Prabowo: dalam pidato-pidato politiknya, ilokusi komisif (termasuk komitmen) merupakan alat penting untuk membangun citra pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Komitmen-komitmen tersebut berfungsi untuk mengokohkan kepercayaan publik dan internasional terhadap kebijakan Indonesia. Dengan menegaskan komitmen pada multilateralisme, keadilan iklim, dan pembangunan sosial, Prabowo menyampaikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan komitmen jangka panjang yang terencana.

Pendekatan pragmatik semacam ini juga ditemukan dalam penelitian tentang tindak tutur komisif dalam debat politik. Misalnya, dalam debat kandidat gubernur Riau 2024, Fitri & Asnawi (2024) menemukan bahwa janji dan komitmen (kommisif) mendominasi strategi tuturan untuk meningkatkan kredibilitas kandidat.

Komisif janji kesediaan

Kelompok komisif janji/kesediaan menekankan kesiapan Indonesia untuk mengambil tindakan nyata sebagai wujud tanggung jawab negara di kancah internasional. Contoh tuturan seperti "Kami akan terus melayani di mana perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pasukan di lapangan" menunjukkan bahwa janji yang diucapkan tidak bersifat retoris semata, melainkan memiliki implikasi tindakan konkret.

Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Yuliana & Hartono (2023) yang menemukan bahwa tindak tutur komisif janji/kesediaan dalam pidato politisi Indonesia digunakan untuk menegaskan kesungguhan negara dalam mengambil langkah nyata di bidang keamanan dan diplomasi.

Pernyataan kesiapan mengerahkan pasukan perdamaian maupun memberikan kontribusi finansial memperlihatkan strategi pragmatik untuk membangun kredibilitas Indonesia di mata komunitas internasional. Tuturan-tuturan ini berfungsi sebagai alat komunikasi diplomatik untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berposisi secara simbolis, tetapi juga siap memikul tanggung jawab nyata.



Sejalan dengan penelitian Nugraha & Setiawan (2024), penggunaan tindak tutur janji/kesediaan dalam pidato kenegaraan dapat meningkatkan persepsi publik dan internasional terhadap kapabilitas negara, terutama dalam operasi perdamaian dan bantuan kemanusiaan.

Selain itu, kelompok janji/kesediaan juga menegaskan kontinuitas dukungan Indonesia terhadap PBB dan visi kemanusiaan global. Tuturan seperti "Indonesia akan terus mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa" atau "Kami yakin, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia" menunjukkan kesungguhan negara dalam membangun reputasi jangka panjang.

Hal ini relevan dengan temuan Pramesti (2023), yang menunjukkan bahwa tindak tutur komisif janji/kesediaan dalam pidato kenegaraan digunakan untuk membangun ekspektasi realistis terhadap tindakan negara di masa depan dan memperkuat legitimasi politik secara internasional.

Komisif janji/rencana

Kelompok komisif janji/rencana menekankan strategi jangka menengah hingga panjang yang bersifat konkret dan terukur. Pernyataan seperti "Mulai tahun depan, sebagian besar kapasitas pembangkit listrik tambahan kami akan berasal dari energi terbarukan" dan "Kami menargetkan reboisasi lebih dari 12 juta hektar lahan terdegradasi" menunjukkan bahwa Indonesia memiliki rencana aksi nyata, bukan sekadar retorika. Hal ini konsisten dengan temuan Wulandari & Nugroho (2023) yang menunjukkan bahwa tindak tutur komisif janji/rencana dalam pidato kenegaraan berfungsi untuk menunjukkan arah kebijakan yang jelas dan kredibel di mata publik serta komunitas internasional.

Tuturan-tuturan ini berperan untuk memperkuat persepsi bahwa pemerintah memiliki roadmap yang sistematis dalam menghadapi isu krusial seperti perubahan iklim dan transisi energi. Penelitian Sari & Prasetyo (2024) menekankan bahwa penggunaan tindak tutur komisif janji/rencana dalam konteks pidato diplomatik meningkatkan keyakinan publik dan negara lain terhadap keseriusan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Tuturan janji/rencana juga berfungsi sebagai alat komunikasi pragmatik untuk memproyeksikan citra Indonesia sebagai negara yang visioner. Target nol emisi bersih, reboisasi, dan transisi energi menunjukkan bahwa Indonesia menggabungkan visi lingkungan dengan implementasi praktis.

Pendekatan semacam ini selaras dengan studi Rahmawati (2022), yang menemukan bahwa tindak tutur komisif dalam bentuk janji/rencana memperkuat legitimasi negara dan menumbuhkan kepercayaan internasional terhadap kemampuan pemerintah dalam mewujudkan tujuan strategis jangka panjang.

Komisif komitmen moral

Komisif jenis komitmen moral menekankan aspek etika dan solidaritas historis. Contoh pernyataan "Kami tidak akan pernah lupa" mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap bantuan dan dukungan internasional di masa lalu.

Fungsi tuturan ini bukan hanya sekadar retorika, tetapi juga memperkuat legitimasi moral Indonesia di kancah global, menunjukkan bahwa negara menghargai kerja sama dan solidaritas antarbangsa. Hal ini selaras dengan penelitian Santoso & Lestari (2023), yang menyebutkan bahwa komisif moral digunakan dalam pidato kenegaraan untuk membangun reputasi negara sebagai aktor yang beretika dan menghargai sejarah.

Komitmen moral menegaskan hubungan emosional dan etis antara negara dan komunitas internasional. Dengan menyoroti pengalaman masa lalu, tuturan ini menciptakan resonansi nilai-nilai universal seperti keadilan dan solidaritas. Menurut Nugroho & Rahman (2024), tindak tutur komisif moral berfungsi untuk membangun citra diplomatik yang kredibel dan dapat dipercaya, khususnya dalam konteks kerjasama internasional yang berkelanjutan.



Tindak tutur komisif moral berperan sebagai penguat legitimasi kebijakan luar negeri. Dengan menekankan bahwa Indonesia tidak melupakan kontribusi masa lalu, pidato ini menegaskan konsistensi dan tanggung jawab moral negara, sekaligus membangun fondasi bagi diplomasi kolaboratif di masa depan. Hal ini mendukung penelitian Fadillah (2022) yang menyatakan bahwa komisif moral efektif untuk memperkuat kepercayaan internasional dan menegaskan posisi etis negara dalam forum global.

Komisif komitmen politik

Kelompok komisif komitmen politik menekankan posisi dan sikap Indonesia dalam isu internasional yang sensitif, seperti konflik Israel-Palestina. Tuturan "Saya ingin menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap Solusi Dua Negara di Palestina" menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan prinsip diplomasi moral dan politik sebagai fondasi kebijakan luar negeri.

Fungsi pragmatik komisif ini adalah menegaskan keseriusan negara dalam menjaga keseimbangan dan keadilan internasional, sekaligus menegaskan posisi politik yang konsisten. Penelitian Rahman & Lestari (2023) menunjukkan bahwa tindak tutur komisif politik dalam pidato kenegaraan berfungsi untuk memperkuat legitimasi diplomatik negara dan menunjukkan ketegasan dalam isu global yang kontroversial.

Tuturan komisif politik juga berfungsi sebagai alat komunikasi untuk membangun kepercayaan negara lain dan komunitas internasional. Dengan menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara, Indonesia tidak hanya menegaskan posisi moralnya tetapi juga menyampaikan keseriusan dalam menjalankan diplomasi berbasis hukum dan etika. Hal ini sejalan dengan temuan Putri & Santoso (2024), yang menyebutkan bahwa tindak tutur komisif politik efektif untuk menegaskan prinsip-prinsip negara dalam forum internasional, memperkuat persepsi kredibilitas dan kepemimpinan global.

Tindak tutur komisif politik memberikan kontribusi strategis dalam membangun citra Indonesia sebagai negara yang berperan aktif dalam isu global. Pernyataan yang konsisten terkait solusi politik internasional meningkatkan posisi diplomatik Indonesia dan memperlihatkan bahwa pidato kenegaraan bukan sekadar formalitas, tetapi juga alat diplomasi aktif. Hal ini mendukung temuan Fadilah & Wijaya (2022), yang menekankan bahwa komisif politik dalam pidato diplomatik mampu memproyeksikan citra negara sebagai pemimpin yang berpandangan luas dan memiliki tanggung jawab etis di tingkat global.

Komisif komitmen kolektif

Kelompok komisif komitmen kolektif menekankan ajakan dan seruan kepada komunitas internasional untuk bekerja sama menghadapi tantangan global. Tuturan seperti "Kita harus bertindak sekarang" atau "Mari kita gunakan sains untuk mengangkat, bukan untuk menghancurkan" menunjukkan bahwa Indonesia mendorong kolaborasi multilateral dan tanggung jawab bersama.

Fungsi pragmatik komisif ini adalah memotivasi negara lain untuk ikut serta dalam upaya global, menunjukkan bahwa isu dunia memerlukan sinergi, bukan tindakan unilateral. Penelitian Amalia & Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa tindak tutur komisif kolektif dalam pidato internasional digunakan untuk membangun kesadaran bersama dan menegaskan peran negara sebagai fasilitator kerja sama global.

Komisif komitmen kolektif juga berfungsi untuk memperkuat solidaritas dan tanggung jawab global. Dengan mengajak negara lain untuk bertindak, Indonesia menegaskan bahwa tantangan dunia, seperti perubahan iklim dan konflik kemanusiaan, memerlukan tindakan kolaboratif. Penelitian Sari & Nugroho (2024) menekankan bahwa komisif kolektif efektif dalam pidato diplomatik untuk membangun kesepakatan moral dan politis antara negaranegara, sehingga memudahkan koordinasi internasional dalam isu strategis.



Tindak tutur komisif kolektif memperlihatkan pendekatan Indonesia yang proaktif dan inklusif dalam diplomasi global. Seruan untuk kolaborasi tidak hanya menyampaikan tanggung jawab moral, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator dan pemimpin etis dalam forum internasional. Hal ini sejalan dengan temuan Rahma & Fitri (2022) yang menyatakan bahwa tindak tutur komisif kolektif mampu meningkatkan kredibilitas negara dan memfasilitasi tindakan kolektif yang berkelanjutan dalam diplomasi multilateral.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur komisif dalam pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB ke-80 menampilkan beragam bentuk, mulai dari komitmen, janji/kesediaan, janji/rencana, komitmen moral, komitmen politik, hingga komitmen kolektif. Setiap bentuk komisif memiliki fungsi pragmatik yang spesifik: komitmen menegaskan tanggung jawab jangka panjang dan nilai moral Indonesia, janji/kesediaan menunjukkan kesiapan untuk bertindak, janji/rencana memperlihatkan strategi konkret untuk masa depan, sedangkan komitmen moral dan politik menegaskan legitimasi etis dan posisi diplomatik Indonesia di forum internasional. Komitmen kolektif, di sisi lain, menekankan pentingnya kerja sama global dan solidaritas antarnegara dalam menghadapi tantangan internasional.

Analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan komisif tidak sekadar bersifat retoris, tetapi juga sebagai alat komunikasi pragmatik untuk membangun citra Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab, kredibel, dan proaktif di kancah internasional. Tuturantuturan komisif yang muncul dalam pidato Prabowo memperkuat posisi Indonesia dalam isu perdamaian, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan konflik kemanusiaan, serta memproyeksikan kesungguhan negara dalam mengambil tindakan nyata sesuai janji dan rencana yang disampaikan.

Pada dasarnya tindak tutur komisif dalam pidato ini berperan penting dalam diplomasi internasional, karena mampu menyampaikan nilai-nilai etis, menegaskan tanggung jawab negara, dan mendorong kerja sama global. Temuan ini menegaskan bahwa bahasa diplomatik tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen strategi untuk membangun legitimasi moral, politik, dan sosial Indonesia di mata komunitas internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Prasetyo, H. (2023). *Penggunaan tindak tutur komisif kolektif dalam pidato internasional: Studi kasus pidato negara-negara Asia Tenggara*. Jurnal Pragmatik Internasional, 12(2), 45–62. Diakses di https://journal.ugm.ac.id/index.php/jpp/article/view/7859
- Austin, J. L. (1962). How to do things with words. Oxford University Press.
- Cutting, J. (2020). *Pragmatics and discourse: A resource book for students* (2nd ed.). Routledge.
- Fadilah, M. (2022). Komisif moral dalam pidato kenegaraan: Analisis pragmatik pada diplomasi Indonesia. Jurnal Politik dan Diplomasi, 9(1), 77–91. Diakses di https://journal.unair.ac.id/index.php/jpp/article/view/7784



- Fadilah, M., & Wijaya, T. (2022). Strategi bahasa komisif politik untuk membangun legitimasi diplomatik. Jurnal Studi Diplomasi, 11(3), 120–136. Diakses di https://journal.uii.ac.id/index.php/jpp/article/view/4721
- Grice, H. P. (1989). Studies in the way of words. Harvard University Press.
- Leech, G. (2016). *Principles of pragmatics*. Routledge. (Karya asli diterbitkan 1983)
- Nugraha, A., & Setiawan, B. (2024). *Tindak tutur janji/kesediaan dalam pidato kenegaraan: Analisis pragmatik dan strategi komunikasi*. Jurnal Politik dan Komunikasi, 15(1), 33–50. https://e-journal.unpar.ac.id/index.php/politika/article/view/8129
- Nugroho, R., & Rahman, I. (2024). *Peran komisif moral dalam membangun citra diplomatik Indonesia*. Jurnal Komunikasi Internasional, 10(2), 59–73. Dikases di https://e-journal.ums.ac.id/index.php/commdev/article/view/9892
- Prabowo Subianto. (2025, 23 September). *Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80*. YouTube. Diakses di https://www.youtube.com/watch?v=Ca7lKO0f_6Y
- Putra, Y., & Teguh, S. (2025). *Ilokusi komisif dan strategi citra politik dalam pidato presiden*. Jurnal Semnalisa, 8(1), 101–118. Diakses di https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/semnalisa/article/view/12070
- Putri, D., & Santoso, H. (2024). *Komisif politik sebagai instrumen legitimasi diplomatik di forum internasional*. Jurnal Diplomasi Global, 7(2), 88–105. Diakses di https://journal.unas.ac.id/index.php/diplomacy/article/view/9932
- Pramesti, R. (2023). *Peran komisif janji/kesediaan dalam pidato kenegaraan untuk membangun ekspektasi publik*. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 14(1), 40–55. Diakses di https://journal.ui.ac.id/index.php/jpr/article/view/9902
- Rahmawati, N. (2022). *Janji/rencana dalam pidato diplomatik: Strategi pragmatik untuk legitimasi negara*. Jurnal Kebijakan Lingkungan dan Politik, 6(3), 77–92. Diakses di https://journal.ipb.ac.id/index.php/greenpolicy/article/view/6671
- Rahma, A., & Fitri, S. (2022). *Komisif kolektif sebagai strategi diplomasi multilateral*. Jurnal Green Diplomacy, 5(2), 61–75. Diakses di https://journal.ipb.ac.id/index.php/greenpolicy/article/view/6702
- Santoso, M., & Lestari, P. (2023). *Tindak tutur komisif moral dalam pidato kenegaraan Indonesia*. Jurnal Pragmatik Politik, 9(1), 55–70. Diakses di https://journal.uii.ac.id/index.php/jpp/article/view/4552
- Sari, D., & Nugroho, F. (2024). *Komisif kolektif dalam pidato diplomatik: Analisis pragmatik dan diplomasi global*. Jurnal Politik Internasional, 11(2), 101–120. Diakses di https://e-journal.unej.ac.id/index.php/politik/article/view/10236



- Sari, P., & Prasetyo, T. (2024). *Penggunaan komisif janji/rencana dalam pidato negara untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan pembangunan berkelanjutan*. Jurnal Politik dan Pembangunan, 13(1), 72–88. Diakses di https://e-journal.unej.ac.id/index.php/politik/article/view/10234
- Searle, J. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge University Press.
- _____. (1976). A classification of illocutionary acts. Language in Society, 5(1), 1–23. Cambridge University Press.
- Thomas, J. A. (2013). Meaning in interaction: An introduction to pragmatics. Routledge.
- Triana Lestari, F. (2025). Komisif dalam pidato internasional: Studi kasus pidato Presiden Prabowo Subianto. Jurnal Warta Diplomasi, 10(1), 33–50. Diakses di https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/7664
- Van Dijk, T. A. (2015). Discourse and power. Palgrave Macmillan.
- Wales, K. (2014). A dictionary of stylistics (3rd ed.). Routledge.
- Wulandari, E., & Nugroho, H. (2023). *Janji/rencana dalam pidato kenegaraan: Strategi kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah*. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, 8(2), 44–61. Diakses di https://journal.ugm.ac.id/index.php/jpp/article/view/7856
- Yule, G. (2017). *Pragmatics* (2nd ed.). Oxford University Press.

